

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang digunakan semata-mata untuk menjamin semua hak warga Negara untuk melakukan proses demokrasi yang sesuai dengan amanah konstitusi, penegakan hukum terhadap politik uang menjadi cara untuk membangun karakter masyarakat yang bersih dan terhindar dari budaya prilaku korup hal ini sudah menjadi penyakit masyarakat di Indonesia yang perlu di tindak secara tegas, karena politik uang dilakukan secara tersrtuktur, sistematis, dan massif kejahatan politik uang merupakan tindak pidana luar biasa maka dalam penegakannya juga memerlukan cara yang khusus.

Berdasarkan uraian ini maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, Bagaimana politik uang pada pemilu di Kabupaten Semarang, Sanksi pidana terhadap pelaku Politik Uang di Pengadilan Negeri Ungaran. Penelitian ini menggunakan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menyelesaikan masalah ini maka di gunakan metode penelitian deskriptif analisis dan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengacu perundang-undangan atau hukum positif yang memberikan implementasi terhadap penegakan hukum di masyarakat,

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum dan data-data yang ada dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang perlu di lakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan gakumdu juga lembaga-lembaga yang ada di pemilu yaitu panwaslu, bawaslu, dan KPU dalam upaya penegakan perlu pembuktian-pembuktian dan alat bukti yang jelas dan proses peradilan yang secara cepat.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilu.*

ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts of political money is used solely to guarantee all the rights of citizens to do a democratic process in accordance with the mandate of the Constitution, law enforcement against money politics becomes a way to build a clean society character and spared from corrupt behaviour of this culture has become a disease of people in Indonesia who need follow up firmly, because of the political money is done in tersrtuktur, systematic, and the money is political crime of massive criminal acts of exceptional then in enforcement also need a special way

Based on this description then there are certain things that become problems, how political money on elections in Semarang, Criminal sanctions against perpetrators of Political money in Ungaran District Court. This research use between the research field and research libraries in resolving this issue then in use research methods a descriptive analysis of the juridical and sociological approach is that refer to legislation or positive law which gives implementation against law enforcement in the community.

This study refers to Act No. 8 in 2012 About elections and the existing data in field. The results of this research show that the enforcement of the law against the crime of money politics need to be done by the police, Prosecutor's Office, courts and gakumdu are also the institutions that exist in the election, namely panwaslu, bawaslu, and the ELECTION COMMISSION in the enforcement efforts need verifications and clear evidence and judicial process that quickly.

Keyword: Law Enforcement, Money Politics, Elections

